

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SEKTOR PERIKANAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh: Dwi Agung Bowo Laksono,¹ Hariyanto.²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sektor perikanan. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan peraturan terkait lainnya, dapat dijadikan sebagai analisis yuridis terhadap program Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam menjalankan upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sektor Perikanan.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif – empiris yang menggabungkan penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer dan data sekunder, yang kemudian data – data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat dua kesimpulan yaitu: pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menjalankan upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sektor perikanan melalui program bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia seperti pelatihan dan bimbingan baik itu teknis maupun administratif, dan program kerja yang bertujuan untuk peningkatan produksi yakni dengan pemberian bantuan hibah alat produksi usaha. Kedua, pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah melaksanakan hibah sesuai dengan peraturan dan membuat laporan monitoring dan evaluasi. Pertanggungjawaban penerima hibah yakni menggunakan barang sesuai peruntukannya dan memberikan laporan penggunaan barang.

Kata Kunci: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Pengembangan, UMKM

Sektor Perikanan

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis pada Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

JURIDICAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE FISHERY SECTOR IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

By: Dwi Agung Bowo Laksono,³ Hariyanto.⁴

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the role of the Department of Marine Affairs and Fisheries DIY in developing Micro, Small and Medium Enterprises in the fisheries sector. The existence of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises and other related regulations, can be used as a juridical analysis of the DIY Marine and Fisheries Service program in carrying out the development efforts of Micro, Small and Medium Enterprises in the Fisheries sector.

This research is a normative - empirical research that combines library research with field research in order to obtain primary data and secondary data, which are then analyzed using qualitative methods.

Based on the results of research and discussion, there are two conclusions, namely: first, the Office of Marine Affairs and Fisheries has carried out efforts to develop Micro, Small and Medium Enterprises in the fisheries sector through programs aimed at increasing human resources such as training and guidance, both technical and administrative, and programs. work which aims to increase production, namely by providing business production equipment grant assistance. Second, the responsibility of the DIY Marine and Fisheries Office is to carry out grants in accordance with regulations and to prepare monitoring and evaluation reports. The responsibility of the grantee is to use the goods according to their designation and to provide a report on the use of the goods.

**Keywords: Department of Maritime Affairs and Fisheries DIY,
Development, Fisheries Sector UMKM**

³ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis pada Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta